

KETERLIBATAN AKTOR DALAM KONFLIK LAHAN DI TELUK JAMBE BARAT, KARAWANG

Ria Renita Abbas¹, Nuvida R.A.F², Nurlela³, Shinta Mutiara Rezeky⁴, Tamra⁵

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin, riarenita10@yahoo.co.id

⁴Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia shinta.mutiara@unusia.ac.id

⁵Universitas Teknologi Akba

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan secara empiris keterlibatan aktor dalam konflik penguasaan lahan tiga desa di Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori *accumulation by dispossession* David Harvey dan pendekatan analisis Stakeholder (pemetaan Gridd). Penguasaan lahan pada wilayah sub urban seringkali diwarnai adanya konflik antara masyarakat dan kaum elit yang berujung pada akuisisi lahan oleh pihak elit yakni korporasi. Kondisi tersebut mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat karena hak atas lahan menjadi hilang. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (2021), tercatat sedikitnya telah terjadi 207 kejadian konflik agraria yang bersifat struktural di 507 desa/kota dengan luasan wilayah konflik mencapai 500.062,58 hektar dan berdampak pada 198.895 kepala keluarga di berbagai provinsi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor antara aktor elit (pemerintah/ korporasi) dan masyarakat dalam penguasaan lahan sangat dipengaruhi oleh adanya kekuasaan dan kepentingan terhadap lahan. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis serta pengumpulan data dilakukan melalui metode FGD dan wawancara mendalam didukung oleh beberapa dokumen yang relevan.

Kata Kunci: Analisis aktor; Penguasaan lahan; Konflik lahan

1. PENDAHULUAN

Konteks lahan memiliki persepsi dan hubungan yang berbeda antara petani sebagai masyarakat bawah dan korporasi sebagai elit ekonomi. Secara spesifik, petani melihat tanah pertanian pada aspek kehidupan sosio-kulturalnya, sementara korporasi memandang tanah sebagai aset kapital yang dijadikan sebagai komoditi karena memiliki nilai ekonomi dan politik. Nilai dan aspek tanah yang memiliki perbedaan kepentingan antara petani dan korporasi akan selalu menghasilkan konflik lahan. Konflik lahan tersebut dicirikan dengan penguasaan lahan oleh penekanan kelompok kuat atau elit yang menang terhadap kelompok lemah yang kalah. Praksis penguasaan lahan tersebut sering kali terjadi melalui jual beli, sewa, penyitaan dan pengambilalihan secara paksa atau perampasan lahan (*Land Grabbing*) sebagai tindakan akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) yang dikenalkan David Harvey (2004). Konflik lahan yang melibatkan korporasi, pemerintah atau elit lainnya dan masyarakat terasa penting dianalisis melalui pemetaan Stakeholder (Reed, dkk, 2009) untuk mengidentifikasi para aktor tersebut.

Konflik lahan seringkali terjadi disebabkan karena adanya akuisisi lahan (*land grabbing*) dan menjadi fenomena global hampir di seluruh dunia seperti yang terjadi di wilayah Afrika (Arighi *et al.* 2010; Makki and Geisler 2011), wilayah Amerika Latin (Clement and Fernandes 2013; Borras *et.al* 2012), wilayah Asia Tenggara dan Selatan (Hughes 2008; Borras *et al.* 2011). Indonesia menempati posisi kedua dalam target investor untuk transaksi tanah di dunia (Magdof, 2013). Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (2021), tercatat sedikitnya telah terjadi 207 kejadian konflik agraria yang bersifat struktural di 507 desa/kota

dengan luasan wilayah konflik mencapai 500.062,58 hektar dan berdampak pada 198.895 kepala keluarga di berbagai provinsi di Indonesia. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa adanya konflik lahan yang terus meningkat mengakibatkan hak masyarakat atas lahan menjadi hilang. Pembangunan yang sejatinya memberikan kesejahteraan bagi rakyat justru selalu berpihak kepada korporasi sehingga melahirkan ketimpangan penguasaan lahan.

Dinamika penguasaan lahan di Indonesia sangat beragam (heterogen), di aras (level) makro penguasaan lahan diidentifikasi melalui relasi kapital dengan kepentingan politik, di aras meso penguasaan lahan dilihat melalui konflik kepentingan dan kewenangan dalam pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan, aras mikro menunjukkan adanya pola diferensiasi atau ketimpangan penguasaan lahan (Bachriadi dan Wiradi 2011).. Konflik lahan yang terjadi di Telukjambe Barat tak terlepas dari pengaruh kepentingan para aktor yakni pemerintah, korporasi dan petani, karena lahan di sekitar Telukjambe Barat telah banyak menjadi kawasan pengembangan industri yang dulunya merupakan lahan pertanian. Konteks perubahan tersebut mempengaruhi eksistensi lahan yang ada di sekitar kawasan industri dan menjadi perebutan para aktor dalam memiliki lahan.

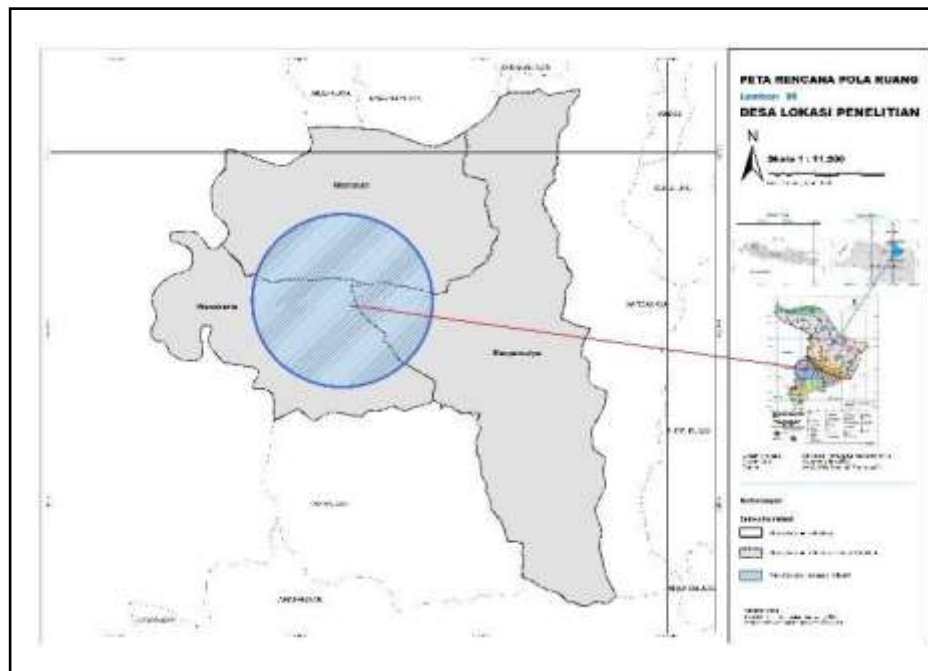
Secara umum, analisis aktor yang terkait dalam konflik lahan tersebut merupakan bagian dari instrumen untuk melihat konteks sosial dari konflik lahan dan kelembagaan yang mengitarinya. Keterkaitan dinamika beberapa aktor dalam konflik lahan pada tiga desa di Telukjambe Barat mempunyai peran tersendiri baik peran elit (kuasa ekonomi atau kuasa politik) juga peran dari masyarakat, peran NGO dan lainnya yang membantu eksistensi masyarakat. Penelitian ini ingin mengkaji Bagaimana keterlibatan aktor pada kasus konflik tanah di tiga desa yaitu Desa Wanasari, Desa Wanakerta dan Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang?. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis keterlibatan aktor pada konflik lahan yang terjadi pada kasus lahan di tiga desa tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis yang penggunaannya dimulai dari adanya masalah-masalah sosial nyata yang dialami oleh sekelompok individu, kelompok-kelompok yang tertindas dan teralienasi dari proses-proses sosial yang sedang tumbuh dan berkembang. Dasar ontologinya adalah realitas sejarah, epistemologinya adalah transaksional dan metodologinya adalah bersifat dialektikal.(Denzin dan Lincoln 2009).

Lokasi penelitian berada di tiga desa yaitu Desa Wanasari, Desa Wanakerta dan Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang (Gambar 1). Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan April 2021. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball. Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu FGD dan wawancara mendalam, dan data sekunder yaitu penelusuran kepustakaan dan dokumen yang relevan. Informan terdiri dari petani pemilik lahan di tiga desa, kepala desa, LSM atau aliansi gerakan, Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian



Sumber: Badan Informasi Geospasial 2021

3. ANALISIS DATA

3.1. Diagnostik Konflik Lahan

Selama puluhan tahun, tanah di tiga desa Telukjambe Barat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai areal pertanian untuk mata pencaharian utama. Tanah tersebut merupakan warisan turun temurun dari generasi sebelumnya kepada anak dan cucu mereka dengan legalitas hak kepemilikan yang dimiliki. Sebelum terjadinya letupan konflik agraria yang terjadi di tiga wilayah tersebut, kondisi lokal masyarakat secara umum memiliki situasi yang penuh dengan politik rezim saat itu yang menginginkan kawasan tersebut masuk dalam wilayah sentra perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan oleh pemerintah tersebut mendorong terjadinya perubahan struktur agraria dan kawasan pada tiga desa (Wanasari, Wanakerta dan Margamulya) di Telukjambe Barat.

Namun, kepentingan petani di tiga desa tersebut harus diperhadapkan dengan kepentingan korporasi industrial untuk kepentingan ekspansi kapital. Hal tersebut berjalan dengan status Karawang sejak tahun 1989 ditetapkan menjadi salah satu kabupaten untuk pengembangan kawasan industri di Jawa Barat melalui Keppres No. 53 Tahun 1989. Berdasarkan Keppres No. 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri menekankan kewajiban suatu perusahaan yang akan menanamkan modalnya pada kawasan tersebut terlebih dahulu mengajukan persiapan penyediaan tanah, penyusunan perencanaan, tapak tanah, dan lainnya.

Dalam perjalanan kurun waktu hingga masa perjanjian penyewaan tanah berakhir, terjadi dinamika yang tidak diharapkan sebelumnya oleh petani pemilik tanah. Tanpa disadari, tanah tersebut diambil oleh pihak perusahaan dengan seluruh bukti hak kepemilikannya. Proses hilangnya hak kepemilikan tanah petani oleh korporasi tidak berjalan begitu saja, melainkan adanya peran aktor lain seperti kepala desa, mafia tanah, serta kelompok koersif non-negara yang mengambil keuntungan dari proses sewa lahan oleh korporasi. Sejalan dengan pandangan Hadiz (2005), yang menyebutkan bahwa adanya pola jaringan dan atau patronase diantara elit lokal dan pejabat setempat dengan pengusaha lokal yang bekerjasama dengan organisasi preman lokal. Jaringan yang terbangun dalam konteks lokal di tiga desa tersebut memiliki

pandangan dan berkepentingan atas tanah sebagai sumberdaya sekaligus asset yang bernilai ekonomi tinggi.

Secara kronologi, konflik lahan dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 1986, PT. DB menyewa lahan milik petani seluas 585 hektar lalu dialihkan kepada PT. MJU. Setelah aset kepemilikan tanah dikuasai oleh PT. MJU, berselang dalam perjalanannya, kemudian pihak PT. MJU menjual kembali hak atas tanah garapan itu kepada PT. SAMP seluas 351 hektar dan PT. MG seluas 231 hektar pada tahun 1990. Melalui proses pengalihan itu, maka PT. SAMP mengklaim sebagai pemilik dari tanah seluas 351 hektar yang terdapat di tiga desa tersebut. Kepentingan pengambilalihan kepemilikan lahan yang dilakukan oleh PT. SAMP dari PT MJU terhadap tanah-tanah milik petani di tiga desa yang menimbulkan protes, dimana PT SAMP berdalih bahwa tanah yang diakusisi sebelumnya akan digunakan untuk merekonstruksi kawasan tersebut menjadi kawasan industri. Sekitar Tahun 1990, untuk memperoleh kejelasan status penguasaan lahan bekas garapan dari korporasi sebelumnya yaitu PT. MJU, pihak PT. SAMP melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Namun tindakan tersebut menimbulkan kritik dan protes warga yang mengklaim sebelumnya sebagai ahli waris pemilik tanah yang dirampas oleh PT SAMP karena tindakan yang dilakukan oleh PT SAMP tanpa adanya transaksi jual beli sebelumnya. Aksi protes itu berhasil mendesak pihak PT. SAMP untuk melakukan pembebasan tanah sesuai dengan langkah serta prosedur yang berlaku (Sepetak, 2020).

Salah satu pemicu lahirnya konflik lahan tiga desa di Teluk Jambe Barat adalah keputusan yang tumpang tindih atas hak kepemilikan tanah. Seperti halnya yang dikuatkan oleh PT SAMP yang mengklaim kepemilikan tanah seluas 351 hektar adalah petal gambar ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Tanggal 20 September 2005. Sementara pada lembaran keputusan lainnya dengan penerbitan yang sama, menetapkan hak kepemilikan tanah sesuai gambar milik petani. Dua keputusan tumpang tindih inilah yang mengakibatkan proses panjang gugatan antara dua pihak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan bahwa sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dari riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya. Lebih lanjut dijelaskan mengenai proses pengukuran jika mengalami permasalahan atau gagal, maka yang berkepentingan atas sebidang tanah, dapat mengadukan dalam proses hukum.

Hak klaim pemilikan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh PT SAMP dari hasil opergarap dari pihak perusahaan sebelumnya yang mencatut hak penguasaan pada lahan seluas 351 hektar dari gambar yang diterbitkan, ternyata didalamnya terdapat lahan milik petani sekitar 70 hektar. Setelah pengukuran lanjutan yang dilakukan, dari 351 hektar yang diklaim ternyata tidak sesuai. Pada tahun 2007, sekitar 48 pemilik tanah melakukan pergerakan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dari sini mulai menguat polemik lewat gugatan demi gugatan dari dua pihak, meski dalam perjalanannya pihak petani mengalami ketidakadilan hukum, sehingga hak tanah mereka hilang dan menjadi kepemilikan oleh PT SAMP. Para petani yang merasa dirugikan oleh keputusan hukum melakukan perlawanan yang mengarah pada tindakan pendudukan lahan dengan berbagai cara. Salah satunya memasang patok dan plang nama kepemilikan dan kembali melakukan kegiatan pertanian di lahan mereka. Tetapi, tindakan petani dianggap sebagai perlawanan kepada PT SAMP atas keputusan hukum, sehingga pada tahun 2012, PT SAMP mengajukan permohonan penggusuran paksa kepada petani. Sebelum proses eksekusi lahan, beberapa mediasi dan pertemuan dilakukan untuk meredam gejolak konflik yang semakin luas.

Pihak pemerintah daerah berinisiatif melakukan mediasi tersebut, tetapi mediasi yang dilakukan lebih bersifat politis, dimana keberpihakan pemerintah daerah lebih besar kepada PT SAMP. Sehingga, setelah dikeluarkannya surat eksekusi dari Mahkamah Agung, maka PT SAMP dengan dalih kekuasaan dan penguasaannya dengan keras melakukan proses eksekusi lahan. Namun, hasil keputusan pengadilan memenangkan PT SAMP atas hak tanah yang

digugat oleh petani. Para petani menyadari bahwa perlawanan mereka tidaklah mudah karena berhadapan dengan kekuatan besar. Begitu lamanya proses perjuangan mereka sejak awal ketika PT DB masuk untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Semua hal tersebut membuat petani melakukan gerakan perlawanan atas permainan politik yang terjadi.

3.2. Pemetaan Aktor dalam Konflik Lahan

Aktor dalam konflik lahan tiga desa di Telukjambe Barat mempunyai kepentingan dan pengaruh kuasa yang berbeda-beda, sehingga penting untuk pemetaan aktor secara jelas. Keberadaan para aktor baik dari segi tindakan atau praktiknya, ada yang menganggap bersifat positif dan sesuai dengan tujuan pemanfaatan sumber daya lahan (tanah) tersebut, dan yang lain dianggap telah bertindak negatif. Pemetaan kepentingan aktor tersebut membantu bagaimana dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan aktor dalam perbedaan-perbedaan kepentingan di lahan yang menjadi sumber konflik di Telukjambe Barat.

Ada tiga aktor penting yang diidentifikasi mempunyai posisi yang penting dalam proses penguasaan lahan di Telukjambe Barat. Pertama, petani sebagai pemilik tanah yang diklaim oleh pihak korporasi. Kedua, pihak korporasi yang memiliki keinginan besar mengubah lahan sebagai lahan kawasan industri atau ekonomi. Ketiga, pihak Negara dalam hal ini pemerintah atau yang terkait dalam melihat dan menilai posisi pihak petani dan korporasi.

Telukjambe Barat menjadi arena pertarungan penting antara kelompok berkepentingan, yakni antara petani pemilik tanah, korporasi dan negara. Tiga kelompok yang bertarung masing-masing memiliki sumberdaya gerakan dan strategi perlawanan untuk menguasai areal tanah yang menjadi objek persengketaan. Posisi petani dalam piramida gerakan terbilang sangat besar dalam sumberdaya atau kelompok gerakan yang termobilisasi, tetapi modal gerakan perlawanan mereka sangat terbatas dari segi konsolidasi politik yang strategis dan hukum. Hal ini terlihat di mana arena pertarungan yang dibuat oleh negara yang bekerjasama dengan korporasi sangat kuat. Dua aktor ini memiliki sumberdaya dalam penguasaan sangat tinggi, negara mempunyai instrumen kebijakan, hukum dan politik yang mampu menekan gerakan perlawanan petani. Sementara, korporasi memiliki modal dan kemampuan negosiasi politik yang dapat mempengaruhi kebijakan hukum atas legalitas kepemilikan tanah para petani.

Identifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dalam konflik lahan tersebut dilakukan berdasarkan dari hasil observasi di lokasi, Focus Group Discussion dan wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terkait di Telukjambe Barat. Tingkat kepentingan aktor dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya lahan. Apabila semakin tinggi tingkat ketergantungan aktor terhadap sumber daya lahan, maka kepentingannya semakin tinggi. Semakin tinggi kekuasaan secara formal ataupun informal (juga sangat terkait dengan kewenangan aktor) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan, maka semakin tinggi pengaruhnya.

Keberpihakan dan sumberdaya yang dimiliki aktor sangat mempengaruhi atas penguasaan dan kepemilikan tanah di tiga desa Teluk Jambe Barat. Tiga desa menjadi arena pertarungan terbuka (open battle) dengan berbagai komponen yang melekat di antara tiga aktor yang berkepentingan atas tanah. Petani sebagai pemilik tanah memiliki komponen yang melekat sebagai basis gerakan perlawanan seperti Angkatan Muda Siliwangi (AMS), SEPETAK, GMBI, petani dan mahasiswa. Korporasi dan negara menjadi dua kelompok aktor yang memiliki kekuatan (power) baik dari modal, politik dan kekuatan koersif negara yang mampu memberikan efek kuat terhadap penguasaan tanah.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat keterkaitan adanya 6 (enam) stakeholder yaitu kelompok petani/komunitas tiga desa di Telukjambe Barat. Kelompok-kelompok gerakan (NGO) yang ikut membantu dan berpartisipasi dalam memperjuangkan hak petani terhadap lahan, kepala desa (terutama yang berperan dalam penyewahan lahan), mafia tanah (beserta

preman yang membantu), pihak korporasi yang menjadi lawan petani dalam konflik lahan dan negara atau pemerintah lokal (BPN, kepolisian, pengadilan, pemerintah lokal kabupaten Karawang). Keterkaitan kelompok petani dan NGO memiliki satu tujuan yaitu, melawan hasrat korporasi atas penguasaan hak tanah yang secara politik didukung oleh peran negara dalam melegitimasi hak penguasaan lewat keputusan hukum yang dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh gambaran bahwa analisis aktor merupakan bagian penting dari instrumen untuk melihat konteks sosial dari konflik lahan dan kelembagaan yang mengitarinya. Hasil analisis menunjukkan adanya dua dominasi aktor dalam konflik lahan tersebut, yaitu pemerintah dan korporasi yang saling berkolaborasi dan mempunyai peran sebagai pemain, di lain pihak petani/komunitas tiga desa di Telukjambe Barat dan organisasi NGO berperan sebagai objek.

Hasil lainnya menunjukkan bahwa relasi kuasa aktor pemerintah kepada korporasi masih dominan dibandingkan kepada para masyarakat lokal atau petani dan organisasi. Aktor korporasi yang mempunyai kapital besar menjadi sebagai raja yang bertahta dan mampu melicinkan hasratnya termasuk dalam penguasaan lahan dan selanjutnya berusaha mendapat profit seeking terbesar lewat perencanaan tata ruang. Relasi kuasa dianggap sebagai mekanisme dominasi kuasa kepada yang lain dengan relasi mendominasi dan yang didominasi.

Peran aktor serta motif dan kepentingan yang mempengaruhi gerakan perlawanan petani dengan pihak penguasaan oleh korporasi disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Identifikasi Aktor Berdasarkan Power dan Interest

Aktor	Peran Aktor	Motif atau Kepentingan	Pengaruh	Sumber Daya (power) yang Aktor Miliki	Tempat Kedudukan Aktor	Konflik Kepentingan antar Aktor
Negara	Pembuat kebijakan	Pembangunan ekonomi	Melegalisasi kan hak kepemilikan lahan	Memiliki otoritas yang kuat secara politik	Lebih tinggi	Adanya gesekan yang kuat dengan kelompok petani dalam aspek kepemilikan lahan
Korporasi	Menginter vensi Kebijakan	Bisnis / akumulasi kapital	Menekan Pembuat Kebijakan	Memiliki kemampuan dari sisi ekonomi	Tinggi	Adanya gesekan yang kuat dengan kelompok petani dalam aspek kepemilikan lahan
Petani	Yang terkena dampak dari kebijakan	Kepentingan ekonomi/ kelang sungan hidup	Menjadi obyek dalam penguasaan lahan	Mobilisasi sumber daya dari komunitas petani	Sedang	Adanya gesekan yang kuat dengan negara dan korporasi dalam aspek kepemilikan lahan
Kelompok Gerakan (NGO)	Mendampi ngi dan mengorganisir Petani	Kepentingan organisasi gerakan	Memperkuat posisi petani	Skill dan pengetahuan dalam gerakan perlawanan	Sedang	Adanya gesekan yang kuat dengan negara dan korporasi dalam aspek kepemilikan lahan
Kepala desa	Mediator antara petani dan korporasi	Posisi/ Jabatan	Negosiator ke petani	Skill atau kemampuan mengkomunikasikan kepentingan korporasi ke petani	Rendah	Kepala desa ikut berkontribusi dalam konflik lahan karena keterlibatan dalam manipulasi dokumen / girik

Mafia Tanah	Mediator antara petani dan korporasi	Ekonomi (penjualan tanah)	Negosiator ke petani	Skill atau kemampuan mengkomunikasikan kepentingan korporasi ke petani	Rendah	Ikut menekan petani dalam memenuhi kepentingan korporasi
-------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------	--	--------	--

Sumber: Hasil olahan data primer (2021)

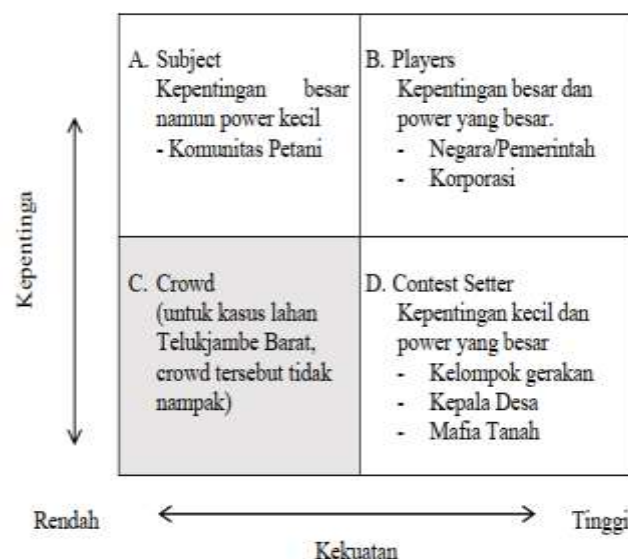
Peran kepentingan aktor dalam konflik lahan dapat dikaji melalui analisis stakeholder. Bryson (2003) menjelaskan bahwa analisis stakeholder merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program atau proyek. Analisis Stakeholder bertujuan untuk mengetahui minat kepentingan dan peranan masing-masing stakeholder (aktor yang berkepentingan) dalam konflik lahan yang terjadi di lahan tiga desa.

Menurut Reed *et al* (2009) dan Thompson (2011) bahwa dengan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki oleh aktor kepentingan (*stakeholder*) maka aktor dapat dikategorikan menjadi empat macam, yakni *key players*, *subjects*, *contest setter* dan *crowd*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa:

1. *Players* adalah stakeholders yang memiliki kepentingan dan pengaruh (power) yang tinggi terhadap sumber daya alam,
2. *Subjects* adalah stakeholders yang memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi pengaruh (power) rendah terhadap sumber daya alam,
3. *Context setters* adalah stakeholders yang memiliki pengaruh (power) yang tinggi, tetapi memiliki kepentingan yang rendah terhadap sumber daya alam,
4. *Crowd* adalah stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang kecil atau sedikit terhadap sumber daya alam

Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dapat digambarkan melalui matriks pemetaan stakeholder atau matriks *grid* (Reed et al 2009) pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Matriks Pemetaan Aktor (Power and Interest) dan Konflik Penguasaan Lahan Tinggi



Sumber: Hasil olahan data primer

Melihat gambar di atas, maka kolom A (*subject*) menunjukkan kelompok aktor yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap lahan, tetapi rendah pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan kepemilikan lahan. Untuk kolom B (*players*) merupakan kelompok aktor yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap lahan dan pengaruhnya juga tinggi dalam proses pengambilan kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan praktis misalnya atau bahkan dalam mengeluarkan sebuah regulasi atau undang undang terkait kepemilikan lahan. Untuk kolom C (*crowd*) mewakili kelompok aktor yang rendah pengaruh dan kepentingannya. *Interest* mereka dibutuhkan untuk memastikan dua hal (a) interestnya tidak terpengaruh sebaliknya, dan (b) kepentingan dan pengaruhnya tidak mengubah keadaan. Untuk kolom D (*contest setter*) merupakan aktor yang tidak memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap lahan tetapi mempunyai pengaruh dalam upaya pemilikan lahan.

Subjects diisi oleh kelompok petani masyarakat tiga desa di Teluk jambe Barat yang memiliki kepentingan yang tinggi, karena keterlibatannya di berbagai budi daya tanaman dalam pemanfaatan sumber daya di lahan konflik. Petani memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada lahan tersebut. Bagi para petani masyarakat desa, lahan berupa tanah tersebut bukan saja tempat mereka untuk menanam dan memanen hasilnya untuk dijual dan menjadi sumber bahan pangan saja, tetapi memiliki makna filosofis dan makna identitas, yang dikaitkan dengan hasil jerih payah orang tua mereka sehingga bisa seperti sekarang dan sebagai bentuk kenangan dan warisan orang tua yang harus dijaga dan dihormati.

Para petani atau masyarakat desa awam biasanya mempunyai tingkat pengaruh yang rendah dalam proses keputusan pengambilan kebijakan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan yang dimilikinya. Rendahnya tingkat pengaruh tersebut umumnya dapat terbentuk karena kurang kuatnya peranan mereka dalam menjalin relasi dengan pihak-pihak otoritas terkait dengan pemanfaatan lahan. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para petani tersebut tidak mampu melawan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak korporasi yang biasanya dibantu unsur pemerintah lokal dan pemerintah daerah. Kekuasaan korporasi yang dibangun secara legal maupun kekuasaan yang dibangun melalui mekanisme struktur dan relasional misalnya berupa modal besar, pasar, otoritas, identitas sosial, pengetahuan, teknologi, dan relasi-relasi yang kuat untuk menggerakkan semua hajat dan tujuannya. Petani setempat hanya kokoh dengan kekuatan identitas sosial sebagai masyarakat yang telah lama dan turun-temurun memanfaatkan lahan yang diwariskan oleh pendahulu mereka.

Players dalam stakeholder pada konflik lahan Telukjambe Barat dimainkan oleh pihak-pihak korporasi yang menjadi lawan petani yang mengklaim kepemilikan lahan dan pihak korporasi dibantu oleh pemerintah (BPN, militer, kepolisian, pengadilan, pemerintah lokal Kabupaten Karawang). Kepentingan korporasi (terutama PT SAMP – PT APL) pada lahan di tiga desa Telukjambe Barat untuk memuluskan bisnis sekaligus memperluas jangkauan kawasan usaha terlebih lokasi tersebut menjadi kawasan industri baru, maka pihak korporasi memainkan berbagai strategi dalam memperoleh sumber daya lahan dari para petani yang berada di lokasi tersebut. Tingginya kepentingan para pihak korporasi pada lahan konflik itu juga dapat dilihat dari pemanfaatannya oleh pihak-pihak korporasi yang telah menguasai dan mengelola sebelumnya dan kemudian berpindah tangan dari perusahaan ke perusahaan berikutnya, dan juga usaha untuk menguasai lahan berupa tanah tersebut secara penuh. Keberadaan pihak korporasi di lokasi tersebut dengan segala tujuan bisnisnya tidak lepas dari keterlibatan pemerintah daerah yang melakukan negosiasi dengan pihak otoritas dan kekuasaan modal tersebut.

Pihak korporasi memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan kekuasaan modal yang besar dibandingkan dengan para petani setempat. Kekuasaan yang dibangun dengan kepemilikan modal besar dan jaringan yang luar biasa memberikan peran yang sangat besar, ketika adanya keputusan pihak otoritas lokal yang memberikan izin atau kebijakan penggunaan lahan dan bahkan pada proses perampasan lahan yang akhirnya oleh keputusan pengadilan memenangkan

pihak korporasi. Semua proses perpindahan hak milik lahan tersebut tidak bisa lepas dari usaha pihak korporasi.

Untuk *Context Setters* dalam konflik lahan Telukjambe Barat tersebut terdapat empat aktor kepentingan diantaranya: pertama, kelompok-kelompok gerakan yang ikut membantu dan berpartisipasi dalam perlawanan petani. Kelompok-kelompok gerakan tersebut berpihak kepada *subjects*. Kedua, Kepala desa, dimana aktor ini bisa dikatakan ada kecenderungan memihak pihak korporasi utamanya para kepala desa terdahulu walaupun kepala desa saat ini terlihat bersifat netral. Ketiga, mafia tanah. Keempat, aktor koersif non-negara yang terlibat membantu alih fungsi lahan oleh korporasi.

3.3. Elit Sebagai Aktor Players

Telah disebutkan sebelumnya *Players* dimainkan oleh pihak-pihak korporasi dibantu oleh pemerintah (BPN, militer, kepolisian, pengadilan, pemerintah lokal) yang menjadi lawan petani dapat memainkan berbagai strategi dalam memperoleh sumber daya lahan dari para petani yang berada di lokasi tersebut.

Players tersebut dapat disebut elit, yang selanjutnya elit menjadi konstruksi sosial yang dapat membedakan antara satu komunitas dengan lainnya. Elit sebagai istilah yang dikenal abad 17 digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang berada pada posisi sosial yang tinggi seperti kesatuan militer, kaum utama dan bangsawan (Keller 1995). Elit sebagai orang-orang yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik dan membentuk kurang lebih sebagai elit kekuasaan yang saling terintegrasi yang keputusan-keputusannya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat, yang selanjutnya dalam pasar global kapitalis mengantar para elit tersebut bertindak pada motif ekonomi dan kepentingan pribadi (Johnson 1988).

Widhiantini (2016) menyebutkan bahwa tata kelola sumberdaya alam lebih berorientasi pada rujukan neoliberalisme dan pembangunanisme. Kedua rujukan tersebut justru sangat berakar pada ekonomi dan fisik yang lebih pada pengejaran keuntungan (*rent seeking*). Elit yang diwakili oleh Pemerintah dan korporasi yang bergandeng mesra dalam kolaborasinya selalu mendominasi kebijakan-kebijakan yang terkait. Seiring hal tersebut, kedua aktor elit tersebut sering memperlihatkan sikap dan perilaku eksplorasi dan eksploitatif, terlebih-lebih terhadap sumberdaya yang diklaim milik negara. Kondisi ini berbeda halnya dengan pihak yang berposisi subordinat, masyarakat sekitar seperti para petani atau bahkan pada yang terbentuk dalam suatu kelembagaan lokal yang merupakan aktor inferior sulit atau bahkan tidak dapat melaksanakan keinginannya untuk mempunyai akses lahan miliknya atau sekedar menyelamatkan sumber daya alam di sekitarnya.

4. KESIMPULAN

Kontestasi penguasaan lahan antara dua aktor utama yakni masyarakat dan korporasi berakhir dengan peminggiran masyarakat sub urban yang kehilangan hak atas tanahnya. Penguasaan lahan menjadi kombinasi jalinan faktor kepentingan politik, ekonomi dan sosial atau menunjukkan konflik dalam masalah tanah berdasarkan kekuasaan (*power relation*) dan kepentingan ekonomi.

Keterlibatan aktor dalam kontestasi penguasaan lahan tiga desa di Telukjambe Barat memperlihatkan adanya pertarungan kepentingan akan lahan dari dua kekuatan aktor utama yaitu pemerintah yang berkolaborasi dengan korporasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri, dan kelompok petani yang memiliki kepentingan akan tanah sebagai penghidupan dan tanah sebagai warisan. Kuatnya kepentingan akan tanah mengundang beberapa aktor lain untuk mendukung dua aktor utama dalam upaya untuk memiliki lahan, walaupun dari sisi kepentingan tidak terlalu besar namun kekuatan yang dimiliki dapat memberikan pengaruh dalam upaya pemilikan lahan. Namun demikian,

besarnya keberpihakan pemerintah terhadap korporasi memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi korporasi dalam menguasai lahan masyarakat.

Pengakuan

Tulisan ini merupakan bagian dari disertasi pada Program Studi Sosiologi IPB yang dibimbing oleh Prof.Dr. Endriatmo Soetarto, MA, Dr, Nurmala K Pandjaitan MS, DEA dan Prof, Dr, Arif Satria, SP, M.Si.

REFERENSI

- Arrighi G, Aschoff N, Scully B. 2010. *Accumulation by Dispossession and Its Limits: The Southern Africa Paradigm Revisited*. St Comp Int Dev 45:410–438
- Bachriadi, Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bandung
- Borras Jr, Saturnino M. and Jennifer F. 2010. “Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance”. ICAS Working Paper Series No. 001. May 2010
- _. 2011. *Political Dynamic of Land Grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*. Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project. Amsterdam
- Borras Jr et al. 2012. *Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America*. Canadian Journal of Development Studies. 33 (4): 402-416
- Bryson JM. 2003. *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. A paper presented at the London School of Economics and Political Science.
- Clements EA, Fernandes BM. 2013. *Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique*. Agrarian South: Journal of Political Economy vol 2(1): 41–69
- Denzin NK, Lincoln YS (Editors). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Hall D. 2011. *Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April
- Hadiz, VR. 2015. *Capitalism, Primitive Accumulation, and the 1960s Massacres: Revisiting the New Order and its Violent*. Inter-Asia Cultural Studies, 16(2): 306-315.
- Harvey D. 2003. *The New Imperialism*. New York. Oxford: Oxford University Press.
- _. 2004. *The 'New Imperialism: Accumulation by Dispossession*. In Socialist Register, edited by L. Panitch and C. Leys. Monthly Review Press. New York
- Hughes C. 2008. Cambodia In 2007: Development And Dispossession. *Asian Survey*, Vol. 48, No. 1: 69-74
- Johnson DP. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid I. Lawang RMZ (Penerjemah Terjemahan dari: *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective*). Jakarta. Gramedia.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern* (terj) Zahaera D Noer. Jakarta. Rajawali Press.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). 2021. *Laporan Situasi Konflik dan Kebijakan Agraria Tahun Kedua Pandemi, Penggusuran Skala Nasional (PSN)*. Jakarta. Konsorsium Pembaharuan Agraria..

- McNaughton C. 2015. *Reading the Mass Violence in Indonesia 1965-1966 as a Form of Primitive Accumulation*. Inter-Asia Cultural Studies, 16 (2): 292-305.
- Magdof F. 2013. *Twenty-First-Century Land Grabs*. Monthly review press. (diunduh pada 27 Juli 2019). Tersedia pada <http://monthlyreview.org/2013/11/01/twenty-first-century-land-grabs>
- Makki, Geisler, C. 2011. *Development by Dispossession: Land Grabbing as New Enclosures in Contemporary Ethiopia*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing (April 24-5).
- Maladi, Vanis. 2012. Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 3 Juli 2012: 432-442.
- Marx, Karl. 2004. *Kapital I: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*. (Penerjemah Oey Hay Djoen). Jakarta. Hasta Mitra.
- Mawardi, M. 2016. *Perlawanan Petani Terhadap Ketidakadilan Agraria Dalam Stigma Gerombolan Pengacau Keamanan (Studi Pada Masyarakat Talangsari Lampung Timur)*. Disertasi IPB.
- Mulyanto, Dede. 2012. *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*. Yogyakarta: Resist Book.
- Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant, The Political Economy Of Rural Society In Vietnam*. United States: University of California Press..
- Rahman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardi. 2014. *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta bekerjasama dengan Sajogyo Institute.
- Reed, S. et al. 2009. *Who's In and Why? A Typology Of Stakeholder Analysis Method For Natural Resources Management*. Journal of Enviromental Management, 90. 1933- 1949.
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Penerjemah: Alimandan), Jakarta. Rajawali Press.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2008. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Judul Asli: *Sociological Theory*. Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta. Rajawali Pers.
- Savitri, Laksmi A. 2013. *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta. Insist Press.
- Schneider, Alison Elizabeth. 2011. *What shall we do without our land? Land Grabs and Resistance in Rural Cambodia*. Paper presented at the international conference on Global Land Grabbing, 6-8 April.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven and London. Yale University Press
- Thompson, R. 2011. *Stakeholder Analysis Winning Suppport for Your Project*. http://www.supras.biz/pdf/MindTools_2011_StakeholderAnalysis.pdf
- Turner, B. S. (Ed). 2009. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Terjemahan oleh Setiyawati A, E dan Shufiyati, R. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Widhianthini et al. 2016. Keterlibatan Para Aktor dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. April 2016, hal 11-22.
- Winarwan, Deddy et al. 2011. *Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural Dan Perlawanan Masyarakat*. Kawistara Vol 1 No 3, Desember 2011: 213-224

Wiradi G. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta. STPN Press.